



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

DINAS KESEHATAN

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029 selesai disusun.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran kondisi kesehatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan gambaran umum wilayah, gambaran pencapaian program, sarana prasarana kesehatan dan pola penyakit yang didapatkan dari kompilasi laporan seluruh sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini masih banyak kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data, akurasi data serta ketepatan waktu penyajian. Untuk itu guna kesempurnaan penyusunan profil dimasa datang kritik dan saran pembaca kami harapkan.

Demikian, atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami mengucapkan terimakasih dan semoga bermanfaat.

Benteng, Agustus 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

dr. H. Husaini, M.Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	25
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan	52
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	53
2.6. Isu Strategis	85
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	86
3.1. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	86
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	89
3.3. Pentahapan Rencana Strategis	96
3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan	97
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan	103
BAB V PENUTUP	164

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
2.1	Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	18

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
2.1	Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2024	19
2.2	Jumlah Distribusi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	21
2.3	Rekapitulasi Inventaris Aset Dinas Kesehatan	21
2.4	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan	52
2.5	Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	54
2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	83
3.1	Tujuan, dan Sasaran Bidang Kesehatan yang Sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	92
3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030	94
3.3	Pentahapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan	96
3.4	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan	98
4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan	104
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	134
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	155
4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	156
4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan	157
4.6	Penetapan Target Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030	160
4.7	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030	161

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik		Halaman
2.1	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	26
2.2	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	27
2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	28
2.4	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	30
2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	31
2.6	Angka Kematian Balita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	31
2.7	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	32
2.8	Angka Kematian Ibu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	33
2.9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	34
2.10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	35
2.11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	36
2.12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	37
2.13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	38
2.14	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	39
2.15	Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	39
2.16	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	40
2.17	Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	41
2.18	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	42

No. Grafik		Halaman
2.19	Cakupan Pneumonia Balita yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	43
2.20	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	44
2.21	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	44
2.22	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	45
2.23	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	45
2.24	Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	46
2.25	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	47
2.26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	48
2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	49
2.28	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	50
2.29	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Keberhasilan pembangunan Kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan tersebut adalah melalui suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama 5 (lima) tahun dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai visi dan misi daerah melalui tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, menyediakan ukuran keberhasilan birokrasi, menjadi acuan dalam penyusunan dalam sebagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal, dan wujud kontak Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah Renstra SKPD.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Kepulauan Selayar berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi RPJPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Melalui program jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005– 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 673);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud, sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun rencana kerja lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

2.6. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Pentahapan Rencana Strategis

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Dipimpin Oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas di dukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan Tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
- b. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengordinasian urusan umum, hukum, dan kepegawaian.
- d. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada semua unsur pada Dinas;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan keputakaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang kesehatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang kesehatan;

- j. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang kesehatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. Memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h. Menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;
- i. Menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
- l. Memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang kesehatan;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris

melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. Mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- m. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. Melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;

- o. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- q. Melaksanakan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- r. Melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. Melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. Memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- v. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. Menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. Menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- m. Menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan

teknis kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

6) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Pelaksanaan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

7) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan

rujukan, serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu. Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah:

- a. Perumusan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

8) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi:

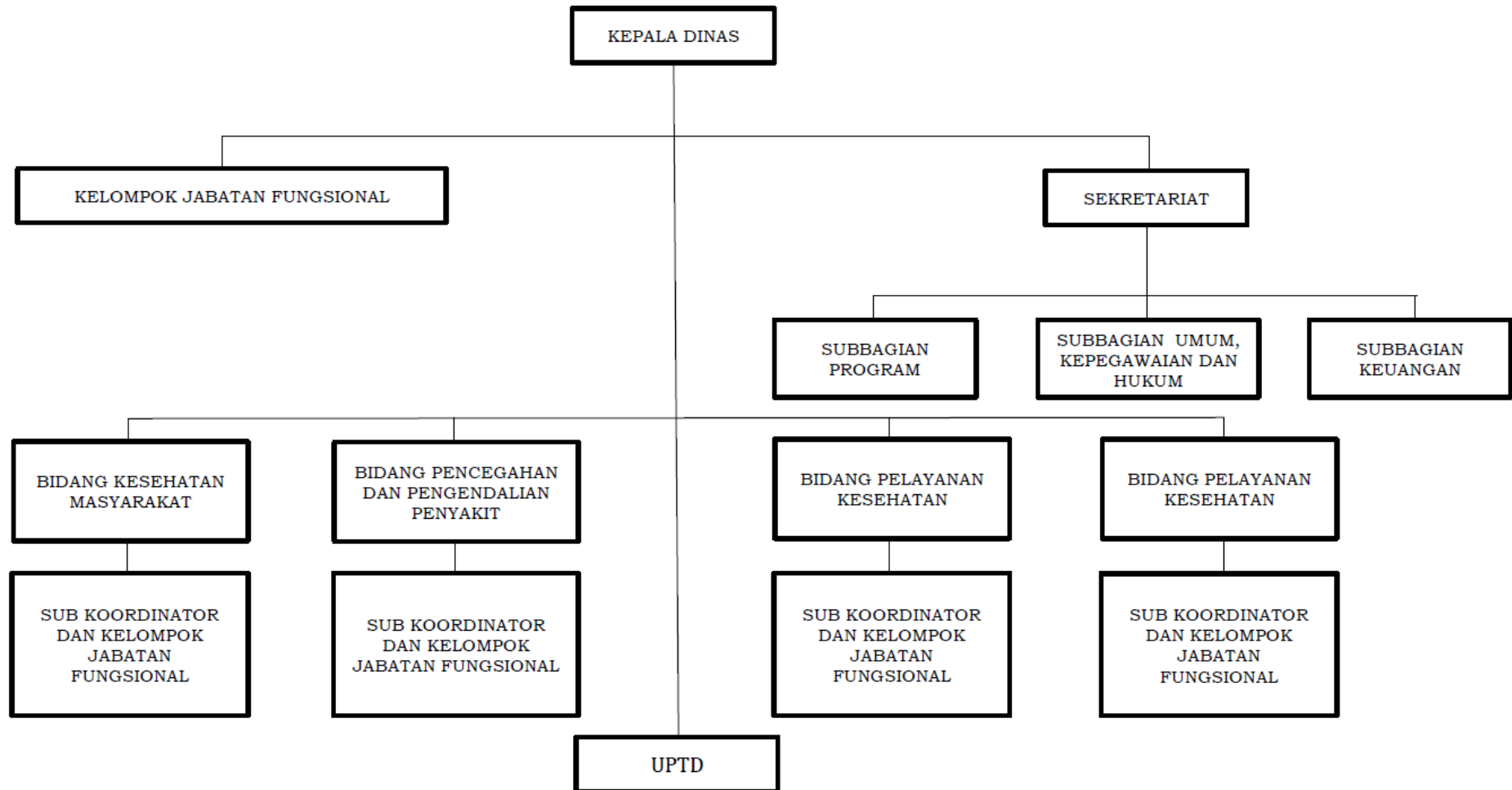
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar



2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi yang diampu, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.827 orang yang baik ASN dan Non ASN tersebar di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar serta fasilitas kesehatan lainnya. Jumlah dan tenaga kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis SDM Kesehatan	ASN		Non ASN		Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk
		L	P	L	P		
1.	Dokter	3	22	9	24	58	40,82
2.	Dokter Spesialis	5	3	0	2	10	7,04
3.	Dokter Gigi	5	6	0	3	14	9,85
4.	Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0	0,00
5.	Tenaga Keperawatan	56	197	72	294	619	435,61
6.	Tenaga Kebidanan	0	185	0	534	719	505,98
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	49	15	44	124	87,26

No.	Jenis SDM Kesehatan	ASN		Non ASN		Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk
		L	P	L	P		
8.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	6	24	6	12	48	33,78
9.	Tenaga Gizi	2	22	2	13	39	27,45
10.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5	23	3	25	56	39,41
11.	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	2	4	2	4	12	8,44
12.	Keterampilan Fisik	2	2	0	4	8	5,63
13.	Keteknisian Medis	7	15	3	10	35	24,63
14.	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	10	4	31	45	31,67
15.	Apoteker	8	23	0	9	40	28,15

Sumber : Data Deskripsi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024

b. Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Selayar

Puskesmas tetap berfungsi melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama seperti yang ditetapkan dalam Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam Permenkes tersebut disebutkan keberadaan tenaga kesehatan masyarakat direduksi menjadi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Adapun data distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan Puskesmas sebagai berikut pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Distribusi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Kefarmasian	Gizi	ATLM	Nakes Lainnya
1.	Puskesmas Lowa	2	1	17	28	5	3	2	2	1	2
2.	Puskesmas Bontosikuyu	2	1	24	37	4	3	2	1	1	2
3.	Puskesmas Bontosunggu	3	1	31	55	3	2	2	2	1	2
4.	Puskesmas Bontoharu	0	1	21	38	2	1	2	2	2	0
5.	Puskesmas Benteng	5	2	35	47	3	2	2	4	2	4
6.	Puskesmas Barugaia	2	1	41	47	7	2	2	2	2	3
7.	Puskesmas Polebunging	2	0	22	39	7	1	5	2	3	0
8.	Puskesmas Buki	1	0	20	50	1	2	3	2	3	0
9.	Puskesmas Bontomatene	1	0	29	42	5	4	6	1	3	0
10.	Puskesmas Parangia	2	1	23	33	3	1	2	4	2	2
11.	Puskesmas Pasitallu	1	1	19	44	8	2	4	2	4	3
12.	Puskesmas Pasimasunggu	2	1	36	33	3	1	3	1	2	0
13.	Puskesmas Ujung Jampea	1	1	16	23	6	2	5	1	2	0
14.	Puskesmas Pasimarannu	2	1	23	27	7	4	2	2	3	1
15.	Puskesmas Pasilambena	1	1	31	39	4	3	3	1	2	6

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Inventaris Aset Dinas Kesehatan

No.	Status				
	Jenis Aset	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara tanpa golongan	✓			8
2.	Tanah Bangunan gudang	✓			10
3.	Tanah bangunan kantor pemerintah	✓			2

No.	Status				
	Jenis Aset	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
4.	Tanah Bangunan pendidikan dan pelatihan	✓			1
5.	Tanah bangunan puskesmas/ posyandu	✓			61
6.	Forklift	✓			1
7.	Portable water pump	✓			2
8.	station wagon	✓			2
9.	Bus	✓			1
10.	Mini Bus	✓			6
11.	Pick Up	✓			1
12.	Sepeda Motor	✓			202
13.	Mobil Ambulance	✓			31
14.	Gerobak Dorong	✓			1
15.	Kapal Motor	✓			10
16.	Mesin Kompresor	✓			3
17.	Mesin Dinamo Kron	✓			2
18.	Bak Air	✓			3
19.	Ukuran Tinggi Orang	✓			17
20.	Mesin Ketik Manual	✓			11
21.	Mesin Hitung Elektronik	✓			2
22.	Lemari Besi	✓			169
23.	Lemari Kayu	✓			73
24.	Rak Besi	✓			9
25.	Rak Kayu	✓			50
26.	Fling Kabinet Besi	✓			3
27.	Brandkas	✓			16
28.	Lemari Kaca	✓			10
29.	Lemari Makan	✓			1
30.	CCTV	✓			1
31.	Papan Nama	✓			17
32.	White Board	✓			1
33.	Mesin Absensi	✓			1
34.	Overhead Projektor	✓			8
35.	Display	✓			1
36.	Alarm Indikator	✓			1
37.	Papan Nama Instansi	✓			25
38.	Papan Pengumuman	✓			8
39.	Alat Kantor Lainnya	✓			19
40.	Meja Kerja Besi	✓			23
41.	Meja Kerja Kayu	✓			64
42.	Kursi Kayu	✓			324
43.	Meja Rapat	✓			31

No.	Status				
	Jenis Aset	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
44.	Tempat Tidur Besi	✓			6
45.	Tempat Tidur Kayu	✓			12
46.	Meja Ketik	✓			22
47.	Meja Resepsionis	✓			2
48.	Meja Tambahan	✓			7
49.	Meja Panjang	✓			4
50.	Meja Obat	✓			1
51.	Meja ½ Biro	✓			175
52.	Spring Bed	✓			2
53.	Kursi Rapat	✓			72
54.	Kursi Tamu	✓			70
55.	Kursi Putar	✓			31
56.	Kursi Biasa	✓			22
57.	Bangku Tunggu	✓			7
58.	Kursi Lipat	✓			1
59.	Meja Komputer	✓			11
60.	Sofa	✓			14
61.	Meubeleur Lainnya	✓			32
62.	Jam Mekanis	✓			2
63.	Jam Elektronik	✓			6
64.	Mesin Pemotong Rumput	✓			1
65.	Mesin Cuci	✓			1
66.	Lemari ES	✓			15
67.	A.C Window	✓			102
68.	Kipas Angin	✓			105
69.	Cold Storage	✓			10
70.	Alat Pendingin Lainnya	✓			4
71.	Kompor Gas	✓			2
72.	Kompor Minyak	✓			1
73.	Rice Cooker	✓			6
74.	Radio	✓			4
75.	TV	✓			50
76.	Amplifer	✓			9
77.	Loudspeker	✓			7
78.	Sound System	✓			14
79.	Wireless	✓			3
80.	Megaphone	✓			7
81.	Microphone	✓			10
82.	Unit Power Supply	✓			5
83.	Tustel	✓			4
84.	Timbangan Orang	✓			30
85.	Tangga Aluminium	✓			2
86.	Dispenser	✓			6

No.	Status				
	Jenis Aset	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
87.	Alat Pemanas Ruangan	✓			1
88.	Alat Rumah Tangga Lainnya	✓			220
89.	Alat Pemadam	✓			10
90.	Alat Pembantu Kabakaran	✓			16
91.	Meja Kerja Eselon IV	✓			58
92.	Kursi Meja Pejabat Lainnya	✓			38
93.	Camera Elektronik	✓			7
94.	Layar Film	✓			19
95.	Telephone	✓			2
96.	Pesawat Telephone	✓			4
97.	Telephone Mobile	✓			7
98.	Hand Talky	✓			6
99.	Antene SHF Transportable	✓			6
100.	Genset	✓			19
101.	Sterilisato	✓			16
102.	Diagnostik Set	✓			18
103.	Stetoskop Set	✓			300
104.	Tensimeter	✓			300
105.	Head Lamp	✓			24
106.	Waskom	✓			68
107.	Timbangan Badan	✓			60
108.	Timbangan Bayi	✓			60
109.	Kocher	✓			28
110.	Tempat Tidur	✓			350
111.	Metal Chatheete	✓			6
112.	Anaromische Pinse	✓			80
Total					67.788

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

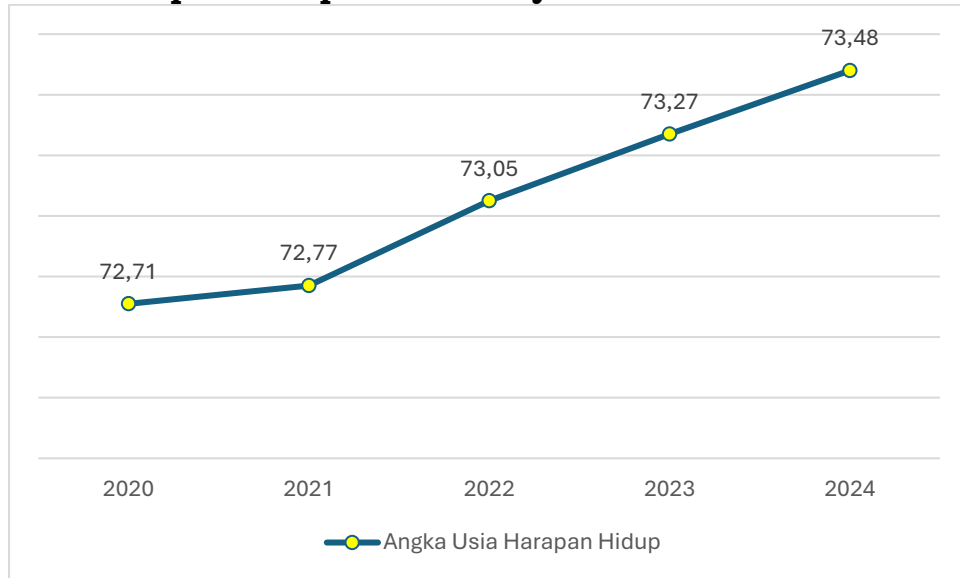
Tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan kesehatan adalah *“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”*. Indikator kinerja tujuan pembangunan tersebut berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang mendukung terhadap tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat Kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup (AHH) memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan.

Untuk dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi, serta pendidikan. Indikator Angka Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survey atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik 2.1
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

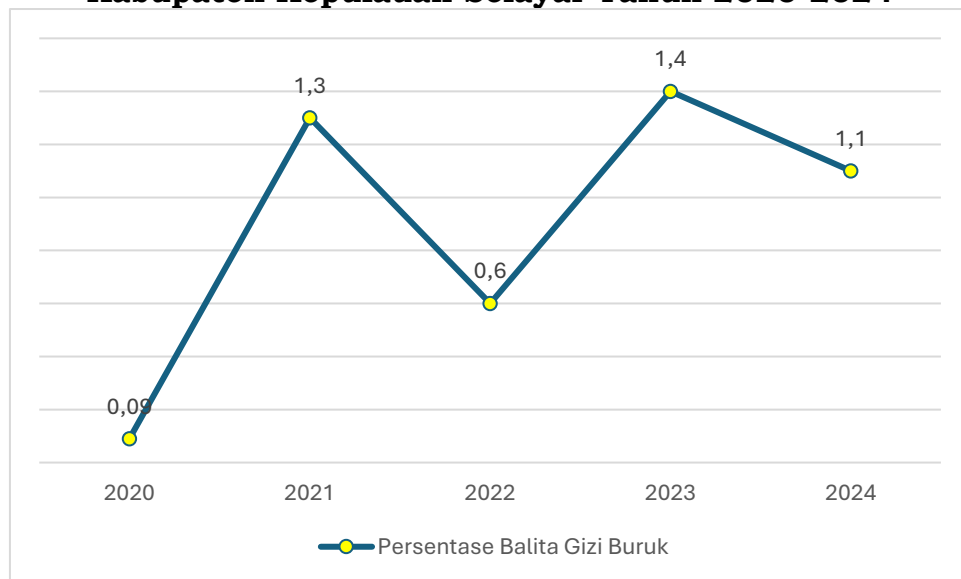
Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat banyak hal yang mempengaruhi angka harapan hidup berdasarkan jumlah bayi lahir dan meninggal dalam periode tertentu. Berikut beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Harapan Subjektif: keinginan yang dimiliki seseorang terhadap panjang usianya sendiri.
- b. Demografi: terdiri dari jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang dimaksud adalah catatan seseorang apakah ia pernah terkena salah satu dari penyakit berat, seperti hipertensi, osteoarthritis, TBC, asma, diabetes, kanker, depresi, sirosis hati, maupun gagal ginjal.
- c. Sosio-ekonomi: termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal (mengontrak atau rumah sendiri), dan asuransi.
- d. Gaya hidup: misalnya merokok, konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga atau tidak.
- e. Psikososial: menggambarkan kondisi mental seseorang, apakah ia merasa depresi, seberapa sering ia memiliki quality time, dan lain-lain.

Beberapa kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain berupa sosialisasi penerapan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan berolahraga rutin.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Grafik 2.2
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi buruk pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Walaupun sesungguhnya, kejadian gizi buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan.

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 88 desa/kelurahan secara berkala, pemberian makanan tambahan

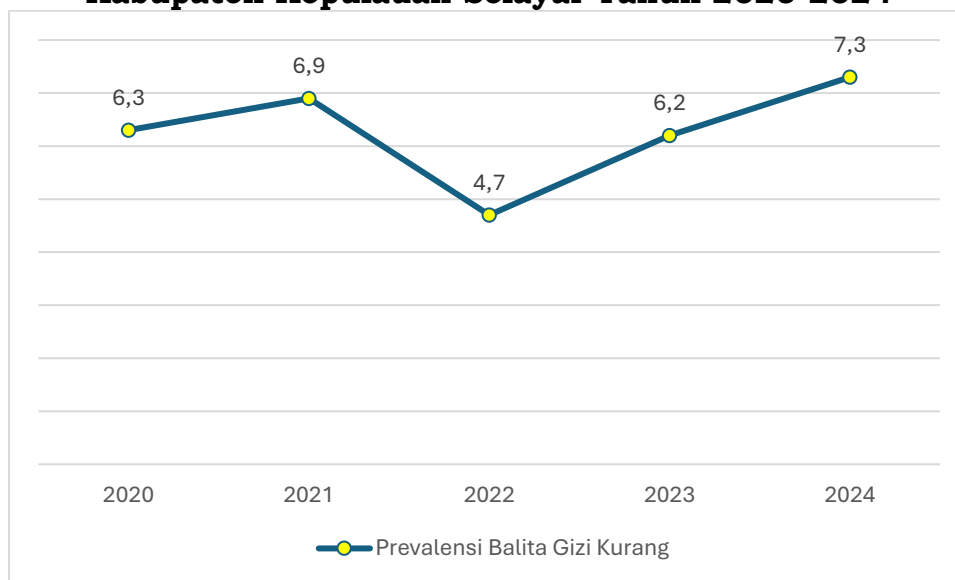
bagi ibu hamil dan menyusui, peningkatan akses pelayanan dan juga perbaikan sanitasi. PSG juga sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan program perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi buruk, antara lain:

- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
- b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
- c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- e. Pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

3. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Grafik 2.3
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi buruk pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Walaupun sesungguhnya, kejadian

gizi buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan.

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 88 desa/kelurahan. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan program perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi buruk, antara lain:

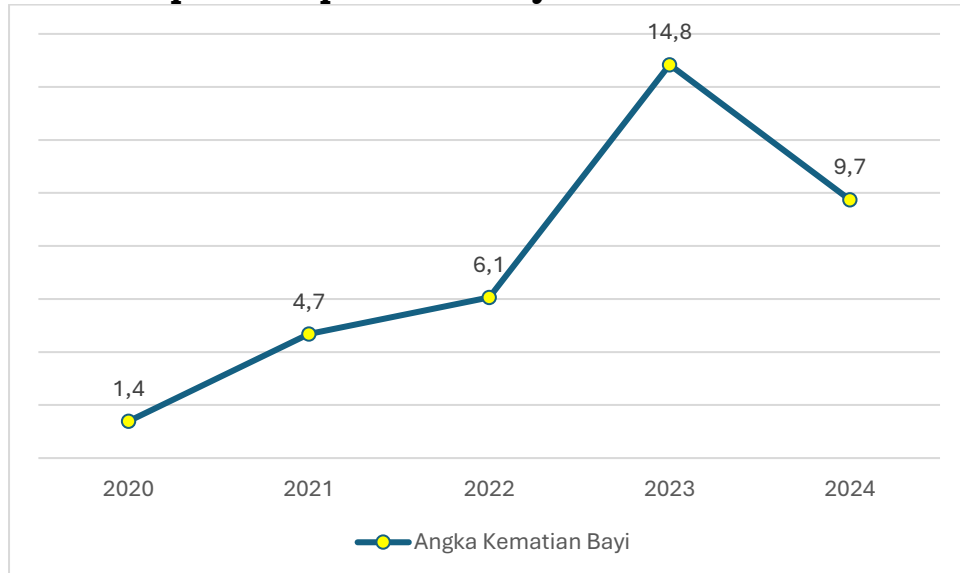
- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
- b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
- c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- e. Pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi

merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



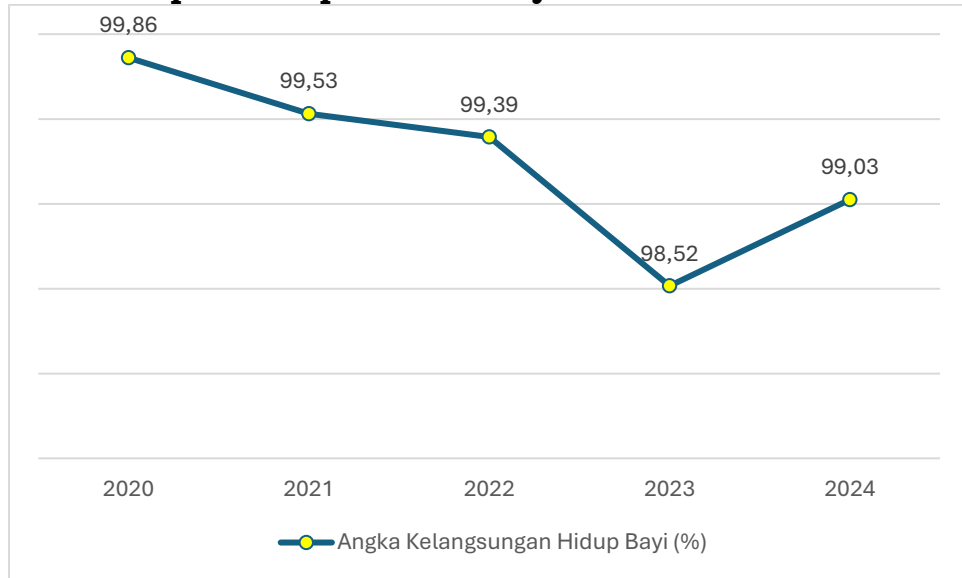
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Masih adanya angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih disebabkan oleh faktor budaya, dimana dalam kasus kematian bayi, kebanyakan disebabkan oleh rendahnya kesadaran pihak keluarga untuk melaksanakan persalinan di pusat pelayanan kesehatan (Pustu/Puskesmas/RSU). Beberapa kasus ditemukan dimana perempuan yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat sehingga tidak tertolong nyawanya. Ini lantaran keluarga terdekat melarang dirujuk ke fasilitas medis yang memadai.

5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator ini menunjukkan besarnya peluang bayi untuk hidup sampai dengan usia 1 (satu) tahun. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa jumlah bayi yang memiliki peluang hidup sampai dengan satu tahun selama periode 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya juga berfluktuasi.

Grafik 2.5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

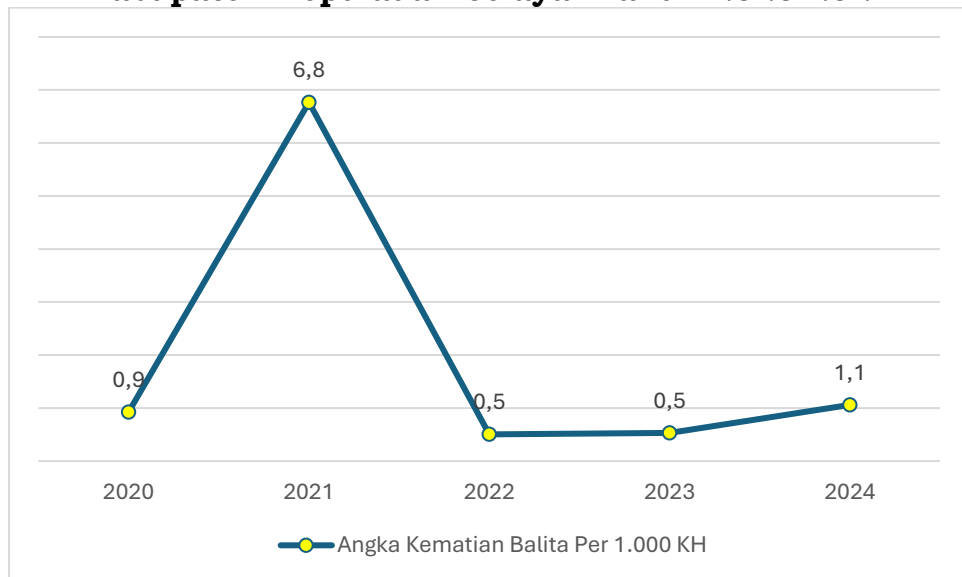


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

6. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Grafik 2.6
Angka Kematian Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

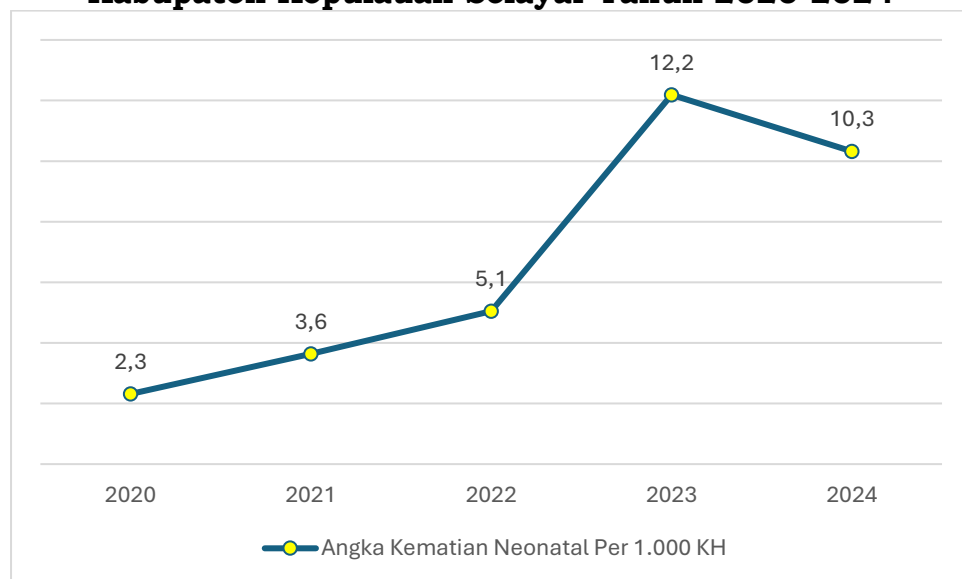
Masih adanya kematian yang terjadi pada balita di kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan dan lain-lain. Adapun upaya pelayanan kesehatan balita untuk menekan angka kematian balita yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Posyandu terintegrasi bagi balita sehat;
- b. Pelayanan MTBS di Puskesmas bagi balita sakit;
- c. Pemberian Makanan Tambahan;
- d. Kelas Ibu Balita.

7. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Grafik 2.7
Angka Kematian Neonatal
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

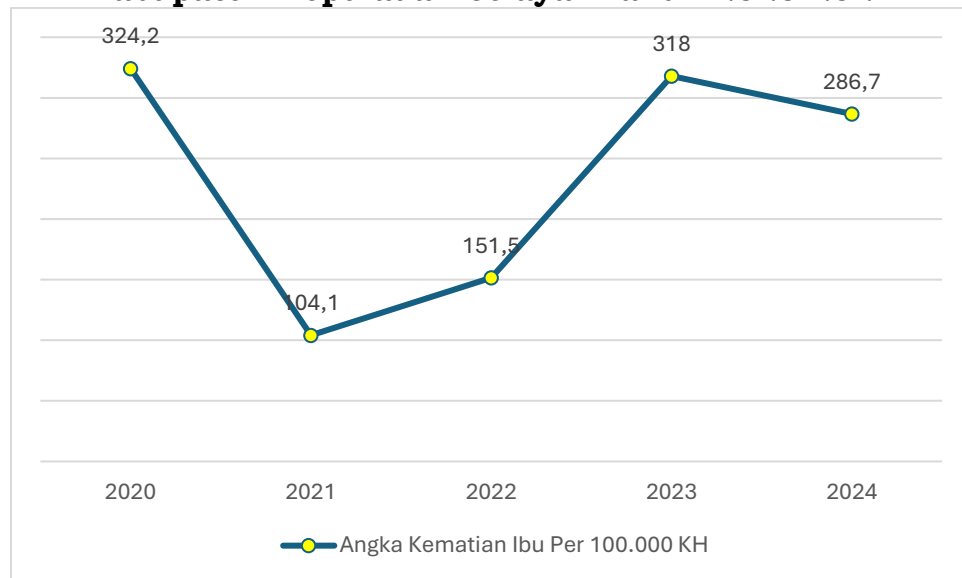
Angka Kematian Neonatal selama periode 2020-2024, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Masih adanya ibu yang melahirkan tidak ditangani oleh petugas kesehatan karena faktor geografis, maupun kesadaran keluarga;
- b. Bayi yang lahir kekurangan gizi;
- c. Kesalahan perawatan dari keluarga.

8. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas disetiap 100.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.8
Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

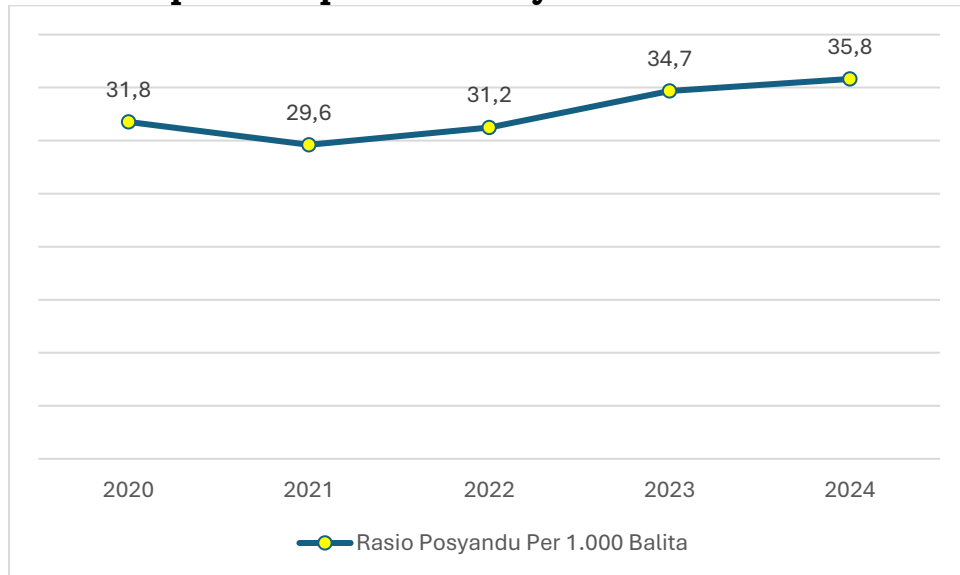
Beberapa faktor yang menjadi penyebab angka kematian ibu ialah peningkatan kualitas pelayanan pemantauan resiko tinggi belum maksimal, kondisi geografis sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak mendukung saat terjadi kasus emergensi yang segera harus dirujuk pada saat persalinan, asupan nutrisi masa kehamilan yang tidak tercukupi sehingga terjadi komplikasi pada Ibu Hamil misalnya anemia dan hipertensi.

9. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan bagi kesehatan ibu dan juga anak. Tujuan utama dari hadirnya posyandu adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelah kelahirannya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, posyandu juga bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari risiko gizi buruk, mendeteksi sejak dini kelainan pada anak, ibu hamil, dan

ibu menyusui serta memberikan imunisasi lengkap pada bayi. Posyandu merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pilar pertama dari transformasi Kesehatan yaitu transformasi layanan primer.

Grafik 2.9
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

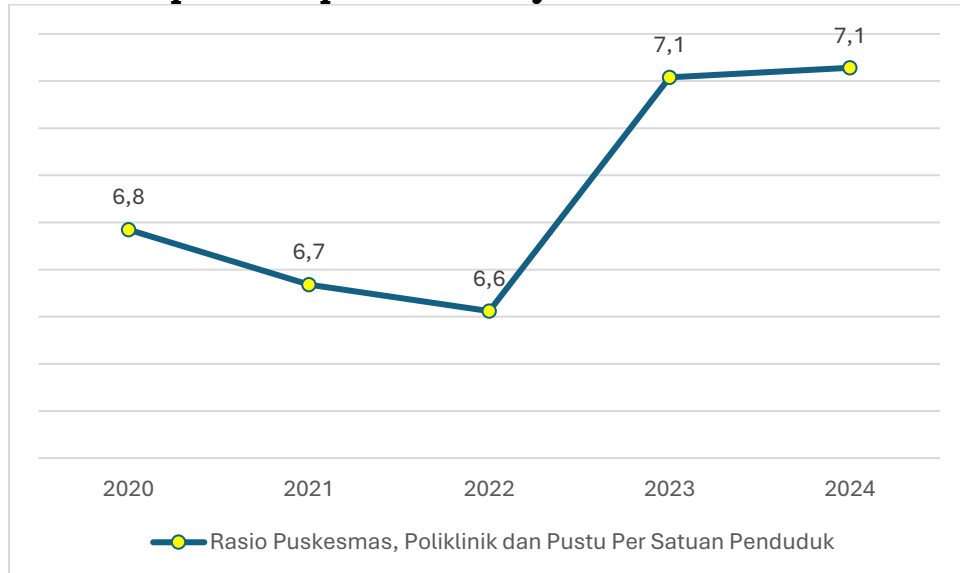
Dari standar rasio ketersediaan posyandu sebesar 1 : 50, sesuai grafik 2.9, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan posyandu di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melayani balita belum memadai dengan rata-rata rasio sebesar 1 :33. Angka rasio tersebut belum melampaui standar yang ditetapkan.

10. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio ini menunjukkan ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun pustu yang mampu melayani penduduk dalam satu satuan pemukiman. Dari sisi ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memadai, rata-rata setiap desa sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa pustu ataupun poskesdes. Selain itu, Dari sisi ketersediaan puskesmas, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, dan Bontosikuyu. Sekalipun demikian, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari banyak pulau, menyebabkan akses penduduk terhadap layanan

kesehatan berbeda-beda, karena belum semua pulau terdapat fasilitas kesehatan.

Grafik 2.10
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

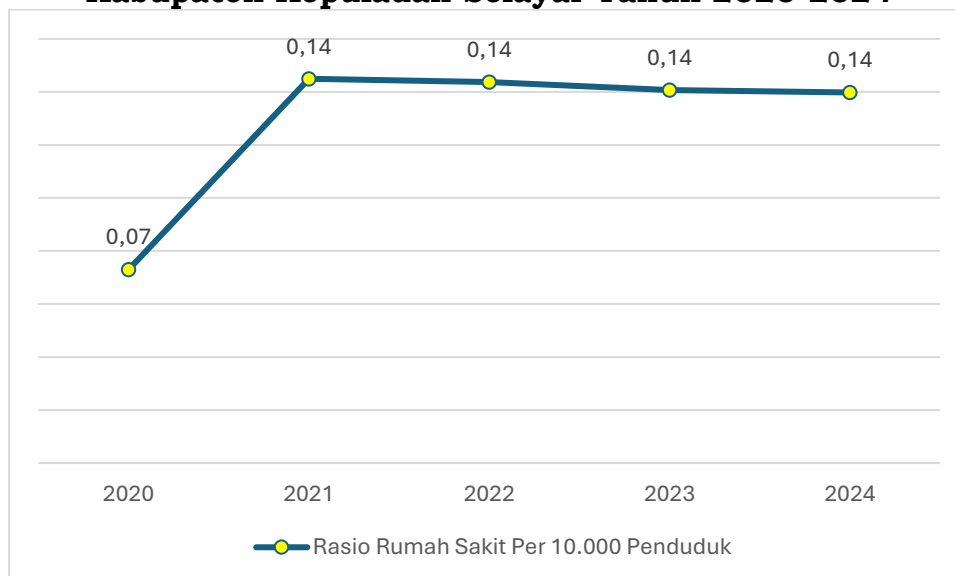
Selama periode 2020-2024, rasio puskesmas, poliklinik, pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah rata-rata dalam 7 unit fasilitas kesehatan melayani 10.000 penduduk, atau 1 unit fasilitas kesehatan melayani sebanyak 1.500 penduduk. Rasio tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah 1 fasilitas kesehatan maksimal melayani 10.000 penduduk.

11. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun Rasio Rumah Sakit selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik

berikut.

Grafik 2.11
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



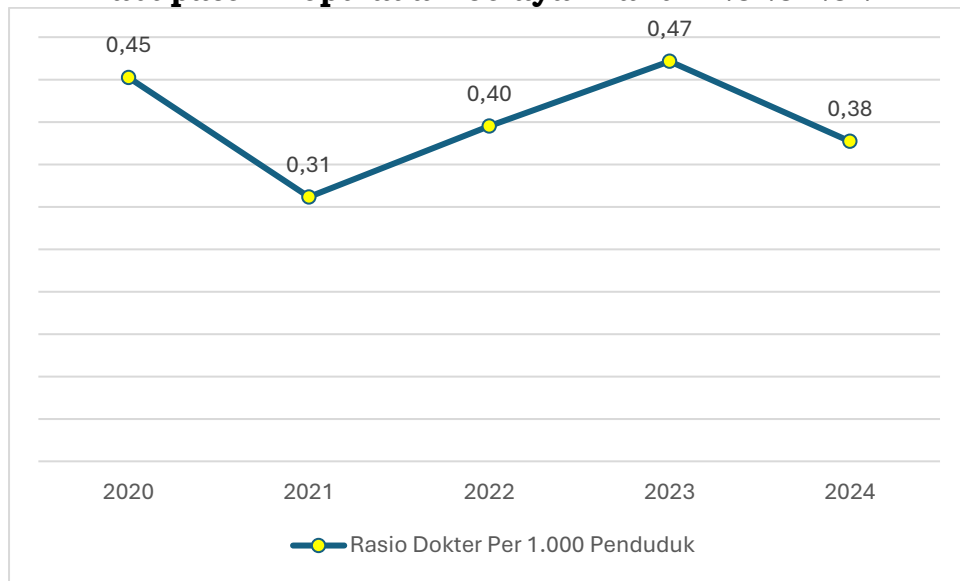
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Ketersediaan Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2024, baru 2 buah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Hayyung dan Rumah Sakit Pratama Jampea. Pembangunan rumah sakit pratama di Pulau Bonerate pada tahun 2023, hingga kini belum dapat dioperasikan karena kelengkapan alat, obat, dan tenaga kesehatan yang belum memadai.

12. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya, adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu. Adapun Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.12
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

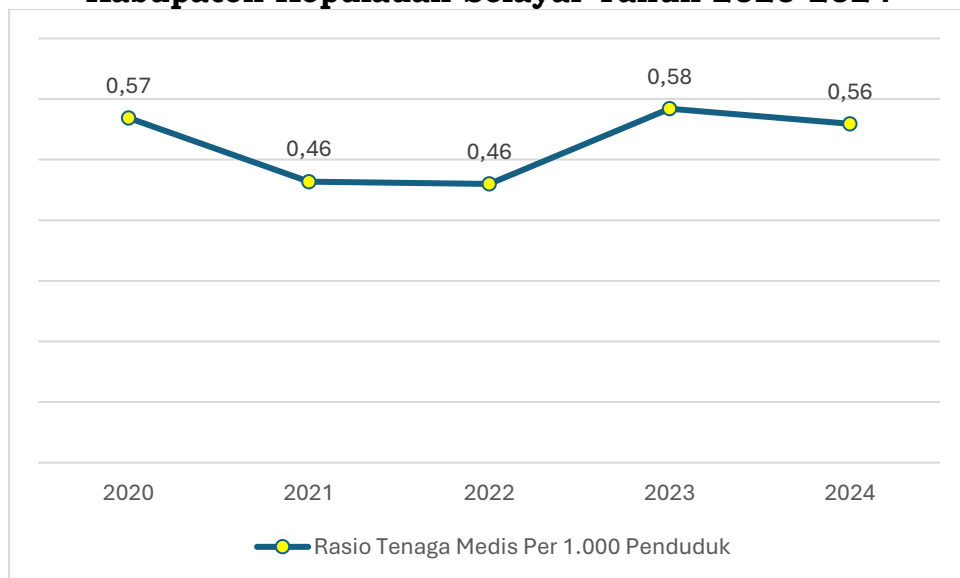
Ketersediaan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari memadai, apalagi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter antara lain melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal penyediaan tenaga dokter. Selain itu, mengusulkan ke kementerian terkait untuk menempatkan tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui rekrutmen maupun penempatan tugas dari daerah lain ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun upaya tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang ada.

13. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per satuan penduduk diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, yang merujuk pada standar minimal pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan Terbaru), **Permenkes No. 43 Tahun 2019** tentang Puskesmas, Standar WHO (World Health Organization), **Permenkes No. 33 Tahun 2015** tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan, **Permenkes No. 81 Tahun 2013** tentang Penempatan Tenaga Kesehatan dalam Rangka Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional dan Perpers No 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Rumpun tenaga medis terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis.

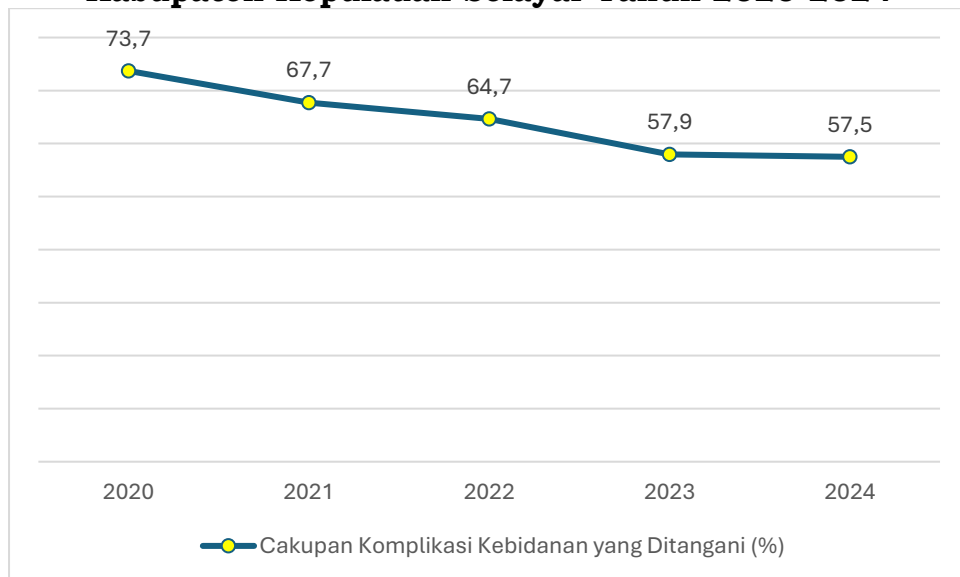
Grafik 2.13
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

14. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

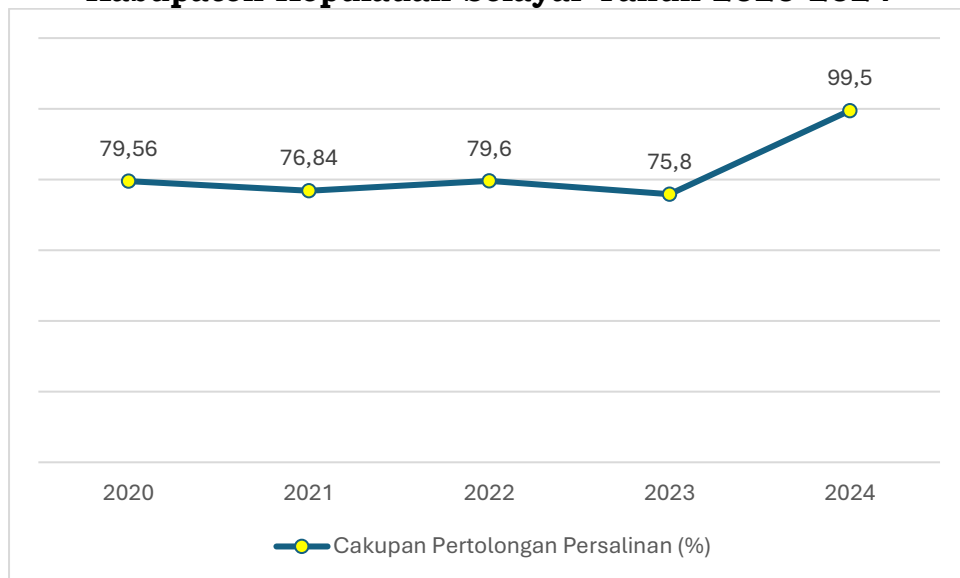
Grafik 2.14
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

15. Cakupan Pertolongan Persalinan

Grafik 2.15
Cakupan Pertolongan Persalinan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

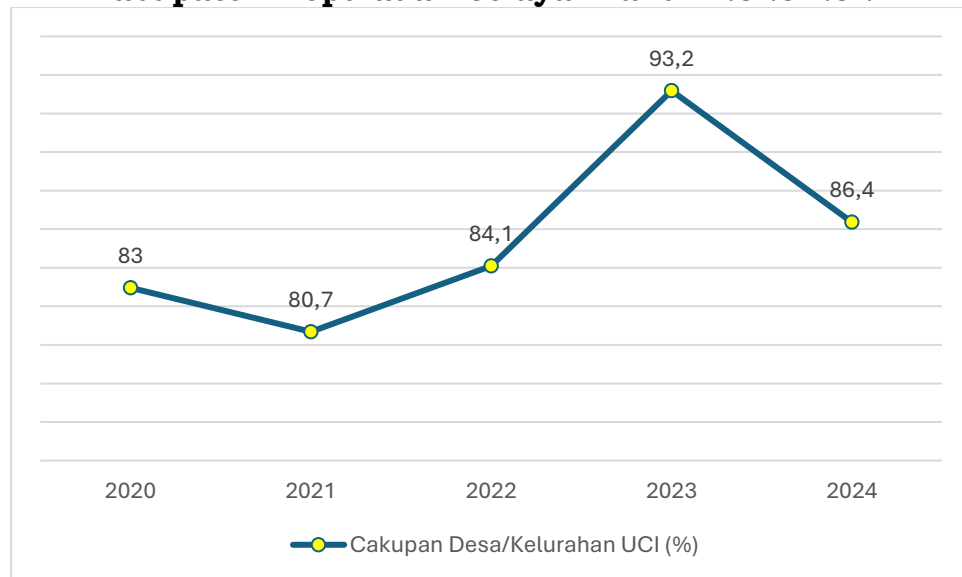
Cakupan pertolongan persalinan mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai 99,5 %, nilai ini tidak terlepas dari tujuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar yang dilakukan oleh petugas kesehatan baik dokter umum, dokter obgyn, bidan dan perawat yang tersebar di beberapa puskesmas baik

pada daratan selayar dan juga wilayah kepulauan yang ada di kabupaten kepulauan selayar.

16. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan UCI adalah Gambaran suatu Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.16
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

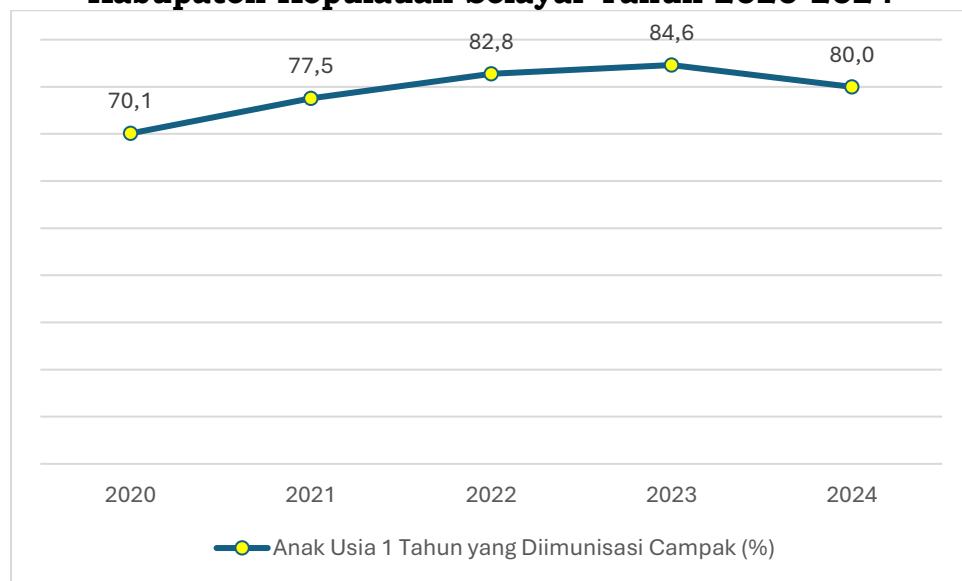
Beberapa faktor yang menyebabkan meningkat dan menurunnya Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena jumlah petugas imunisasi yang terlatih masih kurang selain itu petugas imunisasi mempunyai tugas rangkap dan adanya penggantian koordinator imunisasi disebabkan pindah tugas atau pensiun selain masalah *intern* masalah *ekstern* seperti adanya desa sulit tempat antara puskesmas menyeberangi lautan dan faktor cuaca sehingga pelayanan terhambat. Faktor lain yaitu biaya operasional untuk wilayah sulit yang masih kurang. Selain itu, maraknya isu terkait

Vaksin MR (*Measless Rubella*) yang menimbulkan berkurangnya masyarakat yang mau mengantar anaknya untuk diimunisasi.

17. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Grafik 2.17
Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



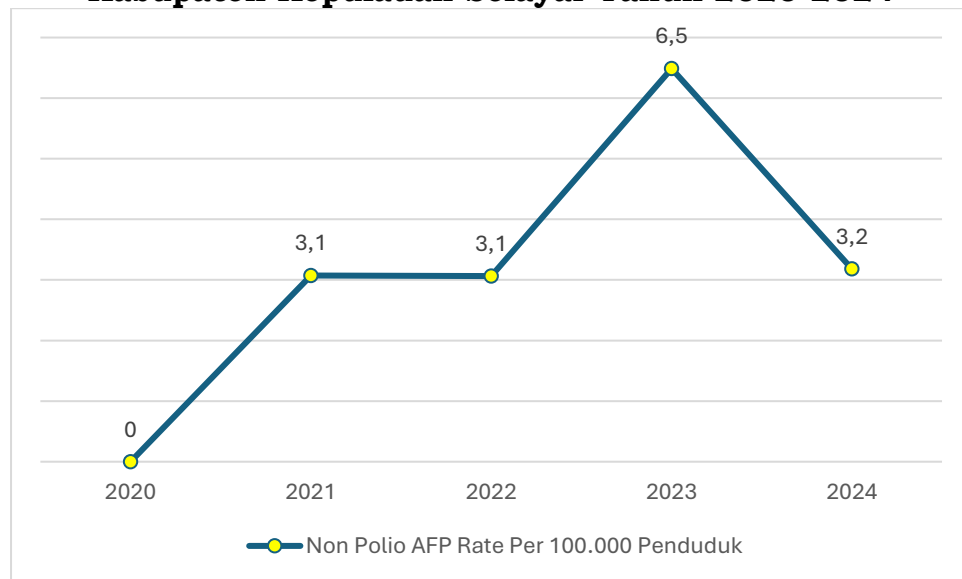
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Selama periode 2020-2024 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terjadi kenaikan setiap tahunnya. Adanya peningkatan tersebut disebabkan oleh, beberapa faktor, antara lain:

- Semakin tingginya kesadaran keluarga dalam mengunjungi posyandu dan atau tempat pelayanan kesehatan terutama pada saat imunisasi;
- Dilaksanakannya program pelayanan imunisasi khususnya campak secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan.

18. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Grafik 2.18
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

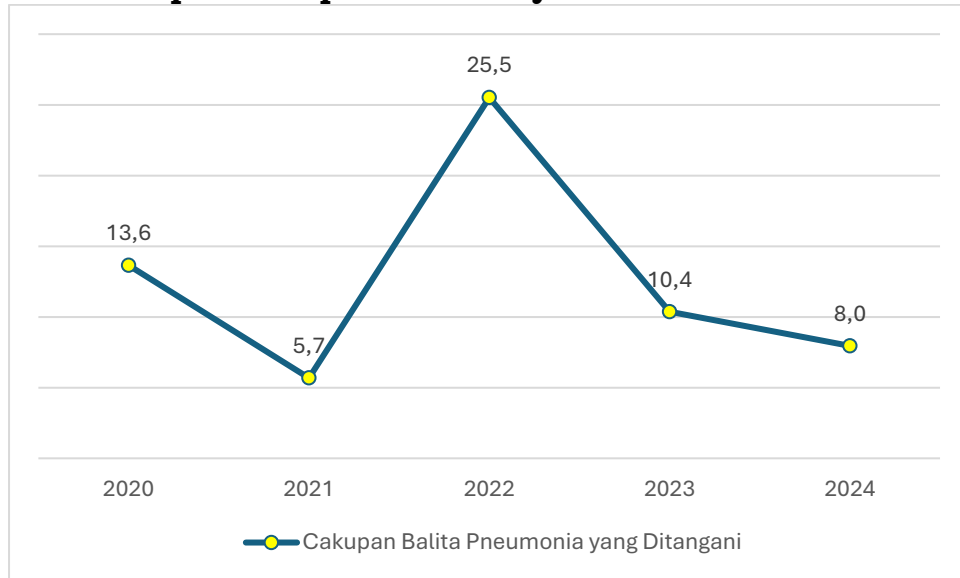


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

19. Cakupan Pneumonia Balita yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan atau kesukaran bernapas. Kasus penemuan pneumonia di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Walaupun demikian, peningkatan penemuan pneumonia khususnya pada balita juga diiringi dengan peningkatan cakupan pneumonia yang tertangani, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19
Cakupan Pneumonia Balita yang Ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



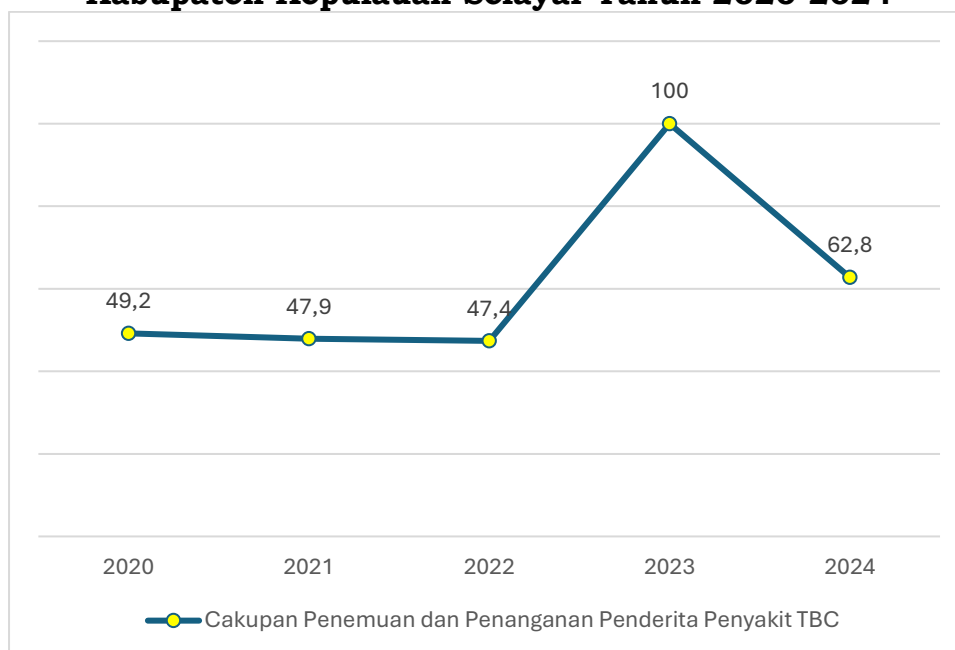
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kasus pneumonia pada balita di Kabupaten kepulauan Selayar terjadi disebabkan oleh faktor risiko intrinsik dan faktor risiko ekstrinsik. Faktor risiko ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari lingkungan sedangkan faktor risiko intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor risiko untuk pneumonia yang berasal dari lingkungan misalnya adalah polusi udara di rumah, kondisi fisik rumah misalnya fentilasi rumah dan pencahayaan serta kepadatan hunian. Faktor yang berasal dari diri sendiri misalnya adalah status imunisasi serta status gizi. Dari semua kasus yang ditemukan seluruhnya (100%) sudah mendapat penanganan.

20. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang rendah.

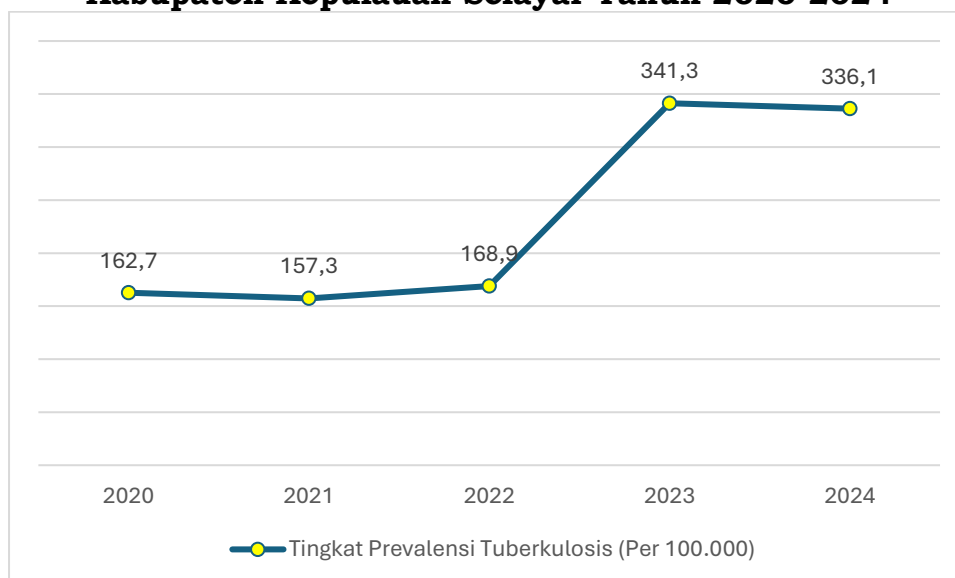
Grafik 2.20
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

21. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

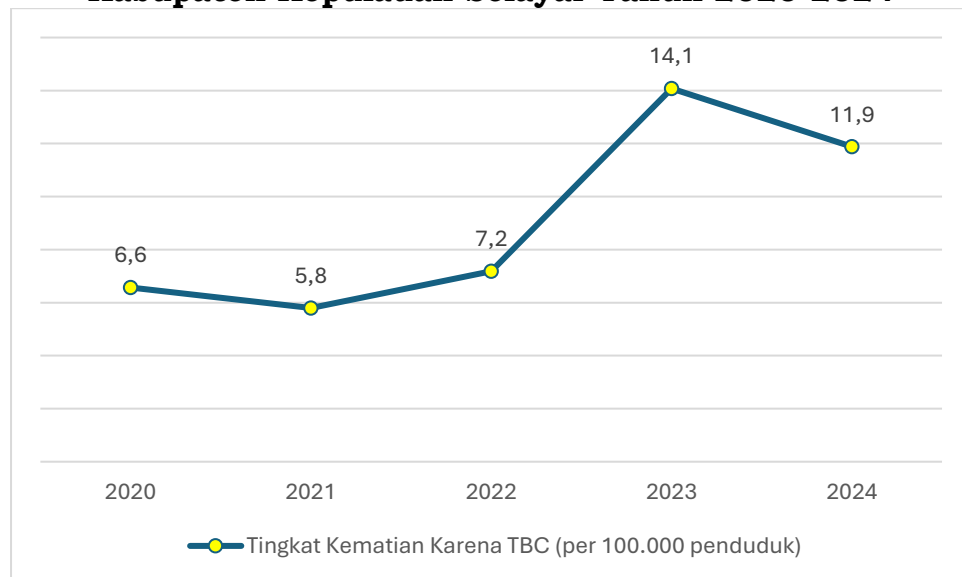
Grafik 2.21
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

22. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Grafik 2.22
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Grafik 2.23
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

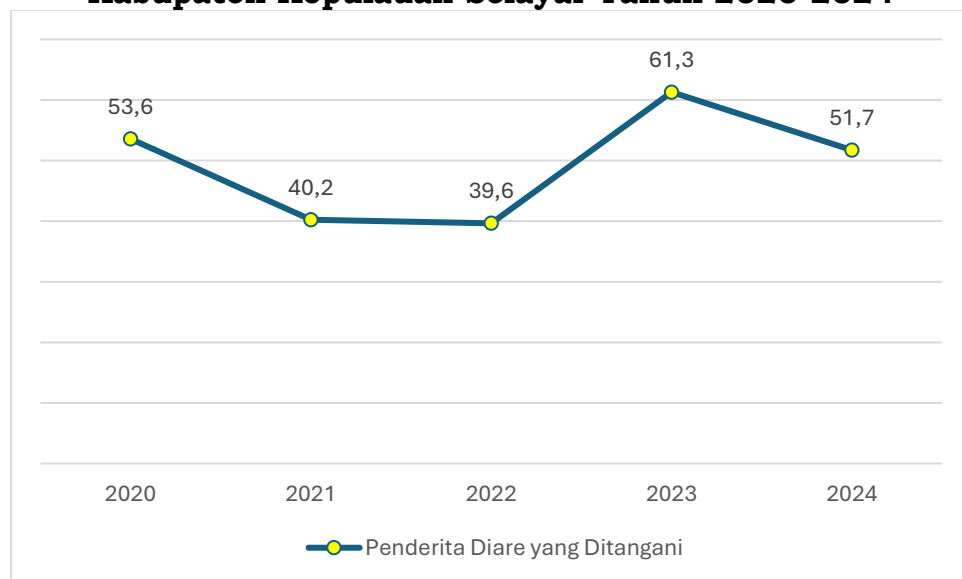


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

24. Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan gejala gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan tinja seseorang berubah menjadi encer dan berair. Selain perubahan bentuk tinja, diare juga ditandai dengan perut mulas akibat gerakan saluran pencernaan yang menjadi lebih aktif. Diare yang berlangsung singkat biasanya bukan merupakan kondisi medis serius. Sebaliknya, diare yang berlangsung lama dan tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam nyawa.

Grafik 2.24
Penderita Diare yang Ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

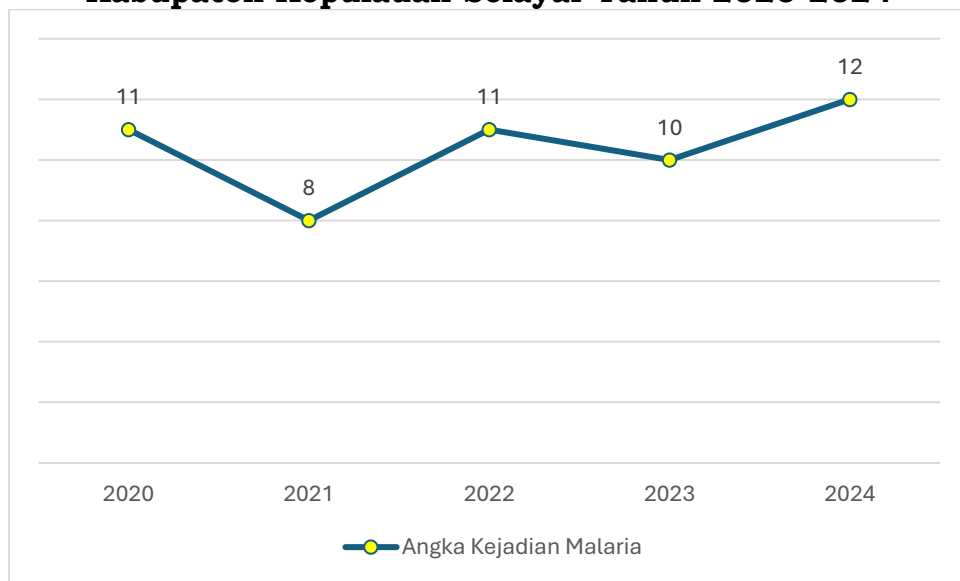
Selama periode 2020-2024 terjadi fluktuasi dalam hal penderita diare tertangani. Kondisi dipengaruhi oleh faktor penemuan kasus yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya. Adapun penanganan terhadap penderita diare, dilakukan melalui:

- Anjuran agar penderita diare mengonsumsi makanan rendah serat;
- Banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi;
- Menghindari minuman berkafein dan beralkohol;
- Tidak makan berlebihan.

25. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Grafik 2.25
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



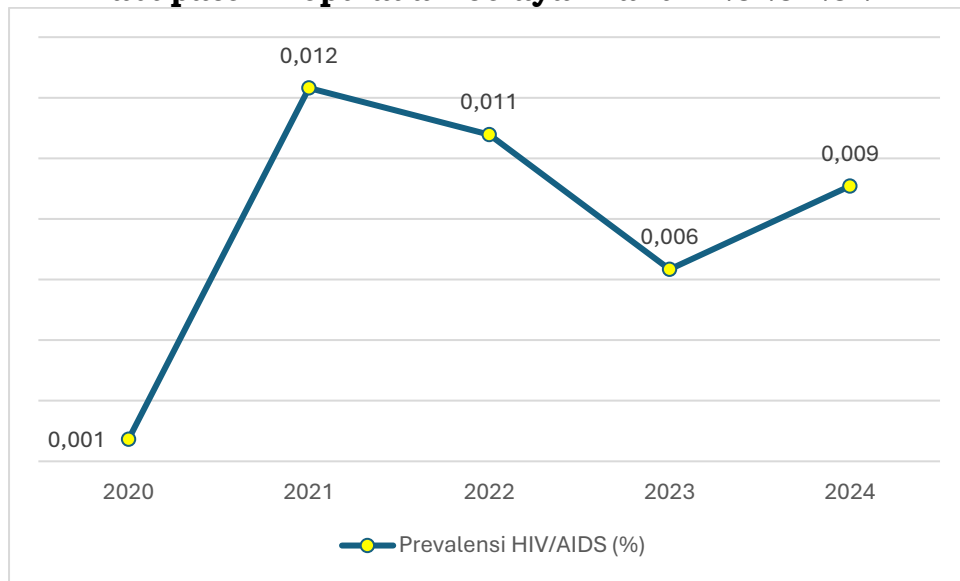
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Selama periode 2020-2024 terjadi fluktuasi dalam hal angka kejadian malaria. Kasus kejadian malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya terjadi karena faktor lingkungan yang kurang bersih sehingga menjadi sarang berkembangnya nyamuk malaria.

26. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Untuk mengetahui prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.26
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



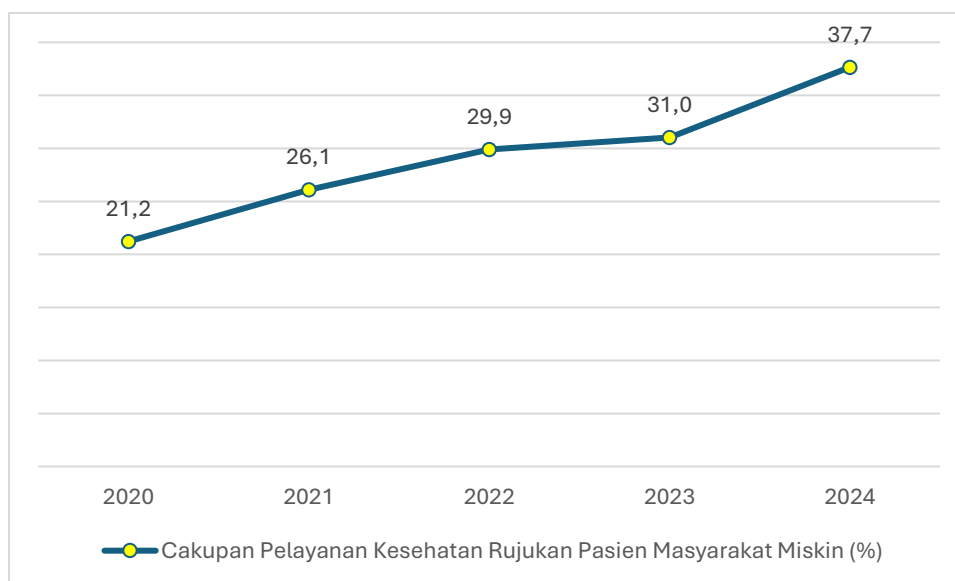
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2020-2024 berfluktuasi. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi umumnya karena ditemukan pada orang-orang dengan riwayat perjalanan pulang dari merantau. Dengan demikian, prevalensi HIV /AIDS dipengaruhi oleh jumlah orang yang datang dari rantau dengan indikasi terinfeksi HIV/AIDS. Walaupun terdapat juga kasus penemuan penderita HIV/AIDS akibat resiko aktivitas yang penderita lakukan sebelum terinfeksi.

27.Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun perkembangan realisasi Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam tabel berikut.

Grafik 2.27
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024



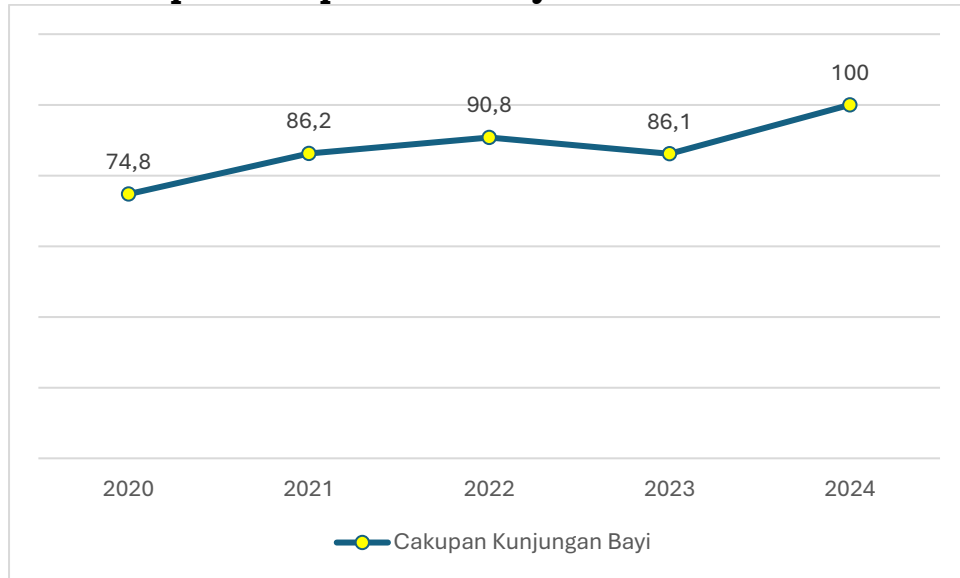
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama periode 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif masih rendah, dengan grafik peningkatan dari tahun 2020 sebesar 21,2% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 37,7%. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kondisi kesehatan masyarakat miskin itu sendiri. Walaupun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, dari seluruh pasien miskin yang berobat 100 % tertangani.

28. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar, disajikan dalam tabel berikut.

Grafik 2.28
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Realisasi Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingkat kesadaran orang tua;
- b. Akses keluarga bayi dengan lokasi tempat pelayanan kesehatan;
- c. Kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal keluarga bayi.

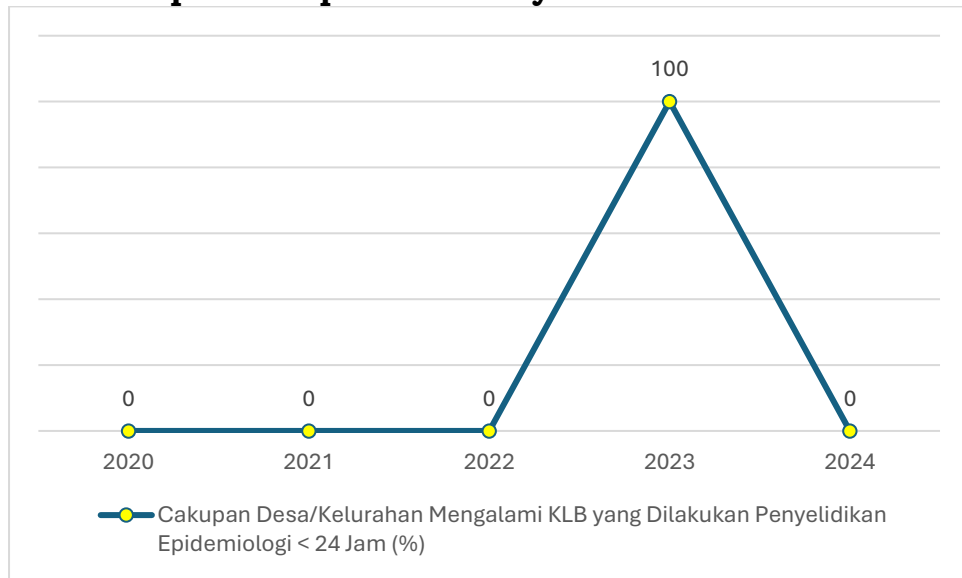
29. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.

Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Jenis penyakit yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2020-2024 yaitu campak.

Grafik 2.29
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Selama periode 2020-2024, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2023 pernah mengalami KLB. Adapun bentuk penanganannya, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan epidemologis untuk mengetahui penyebabnya dan upaya antisipatif agar penyakit terkait tidak berulang;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana air bersih dan atau air minum;
- c. Pembangunan jamban keluarga;
- d. Peningkatan kompetensi Petugas Kesehatan dalam penanganan KLB.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Sekretariat	Pelayanan Asministrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaiaan serta Sarana dan Prasarana	Seluruh Bidang Lingkup Dinas Kesehatan; Seluruh Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan
2.	Bidang Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, Kesehatan lingkungan, promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang berfokus pada pembiayaan dan jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan Kesehatan rujukan	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar; Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar
4.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi dan krisis Kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa	Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar; Balita di Kabupaten Kepulauan Selayar; Orang Dalam Gangguan Jiwa di Kabupaten Kepulauan Selayar
5.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang berfokus pada sumber daya manusia Kesehatan dan	Masyarakat Kabupaten

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		sarana Kesehatan, kefarmasian dan perbekalan Kesehatan	Kepulauan Selayar

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan program sebagaimana dijabarkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD). Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar membantu mengemban kewenangan di bidang kesehatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelaksanaan urusan di bidang Kesehatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
1.	Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya upaya promotif-preventif kuratif dan rehabilitatif di seluruh kecamatan
		Belum optimalnya perilaku hidup sehat dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis
		Masih tingginya prevalensi stunting
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan
		Masih rendahnya kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah sulit akses
		Masih rendahnya kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan sistem <i>telemedicine</i>
		Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah
		Belum optimalnya kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan
		Belum optimalnya pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya

		konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi
--	--	---

2.6. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa akan datang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah sejalan sampai saat ini, sehingga dapat digambarkan isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Isu Strategis Nasional

a. Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65 persen dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57 persen dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29 persen dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang

mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

b. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan, maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70 persen daerah terbangun dan 30 persen daerah terbuka hijau serta 10 persen daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70 persen merupakan kawasan lindung dan 30 persen Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparaturnya daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80 persen, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman

pohon sebesar 70 persen, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80 persen, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80 persen. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) Availability, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) Acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80 persen kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi.

Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sumber daya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

c. Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara

umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

d. IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan

sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan *visual arts*, kuliner).

e. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productiviti selama tahun 2015 2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode scbclumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran

pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *day care* berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

f. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak Pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

g. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan

Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

h. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

i. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

j. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

2. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Global

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel- variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, dan Ekspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan) mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan.

Tingkat stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan relatif rendah, terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

b. Pemanfaatan Bonus Demografi

Sulawesi Selatan kedepan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, Dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang kedepan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

c. Pengelolaan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam tataran nasional dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau, namun sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai Kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara umum pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga

berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

d. Kontribusi Sulawesi Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong

kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

Meningkatnya kebutuhan pangan sebagai dampak pertumbuhan penduduk menjadi tantangan Sulawesi Selatan dalam menguatkan ketahanan pangan daerah. Selain itu kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang dapat merusak lahan pertanian serta tingginya alih fungsi lahan pertanian, yang diperparah dengan menurunnya kualitas dan produktifitas lahan, serta infrastruktur pertanian yang kurang memadai, juga berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi dan berkualitas di masyarakat. Posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang perlu dikuatkan ditunjukkan oleh kondisi Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di tahun 2024, masih berada di urutan ke 4 dengan IKP tertinggi dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan nilai 83,82 persen dibawah Provinsi Bali (88,23), Provinsi Jawa Tengah (85,34), dan DKI Jakarta (85,13). Selain itu, jumlah petani skala kecil di Sulawesi Selatan mencapai 556.446 unit atau 53,35 persen dari total petani yang ada atau dari 100 petani 53 diantaranya petani skala keci, Sulsel peringkat ke 28 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia.

Selain ketahanan pangan, posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan seyogyanya memberi dampak positif terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan yang mencerminkan rendahnya akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar penduduk. Distribusi pangan yang tidak merata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Masalah utama yang menyebabkan ketidakmerataan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai, rantai pasok yang masih kompleks, serta kurangnya koordinasi antara daerah yang berdampak pada fluktuasi harga pangan, dan pada akhirnya mempengaruhi pola

konsumsi pangan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Konteks pembangunan ke depan, perlu diperhatikan upaya peningkatan akses terhadap sarana pangan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah sulit akses. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk mengoptimalkan diversifikasi pangan dan meningkatkan literasi gizi masyarakat, agar masyarakat lebih menyadari pentingnya mengonsumsi beragam jenis pangan yang lebih bergizi dan menyehatkan. Perubahan iklim dan kejadian bencana yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi sumber pangan lokal. Olehnya itu, penting untuk meningkatkan pendampingan dan pendidikan petani tentang pertanian berkelanjutan dan menjaga produktifitas lahan yang ramah lingkungan.

e. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan dekat dengan rencana Ibu Kota Negara (IKN) berperan penting sebagai penyangga pangan IKN dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama

dalam hilirisasi komoditas unggulan Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infratraktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan/permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan multiplayer effect melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

f. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-

prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayanan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui autonomous investment maupun induced investment sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Kapasitas fiskal ini mencerminkan kekuatan dan kesehatan keuangan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya keuangannya, yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan, besaran belanja yang harus ditanggung, tingkat utang, dan kondisi ekonomi secara umum, baik di tingkat nasional maupun regional.

Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, baik oleh salah faktor ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan yang rendah terjadi karena terbatasnya

kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah juga masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang undangan. Selain itu, inflasi yang belum terkendali, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, belum optimalnya peningkatan kontribusi pajak daerah, dan keterbatasan digitalisasi hampir pada semua sektor juga mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal Sulawesi Selatan.

g. Penguatan Sistem Pengawasan Ekosistem Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligent/AI*) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan e-commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang

cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

h. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi/Pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

Diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pemerataan hingga daerah 3T, perbaikan gizi masyarakat berbasis siklus hidup, pemenuhan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak termasuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

i. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air, jasa

lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan banjir serta jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, jasa lingkungan penyediaan air di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kategori kelas rendah (sangat rendah-rendah) telah meliputi 65,32% dari total luas wilayah. Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati dengan kategori kelas rendah (rendah-sangat rendah) sebarannya mencakup 60,98% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan jika kemampuan daya dukung untuk jasa-jasa lingkungan tersebut telah membutuhkan upaya-upaya perbaikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya dukungnya. daya dukung air, beberapa wilayah kabupaten/kota telah menunjukkan angka negatif yang berarti kebutuhan air di wilayah tersebut lebih tinggi dari ketersediaannya. Walaupun ada juga kabupaten yang memiliki ketersediaan air melimpah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan menurunnya daya tampung yang diindikasikan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

j. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman global yang dikenal dengan *Triple Planetary Crisis* yaitu perubahan iklim, berkurangnya biodiversity serta penumpukan limbah dan polusi. Perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sudah menjadi perhatian serius hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim seperti, cuaca ekstrem, kenaikan suhu dan permukaan laut, meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir, meningkatnya kegagalan panen dan bencana kelaparan serta meningkatnya risiko penyakit.

Indonesia termasuk Sulawesi Selatan juga terdampak secara nyata dan signifikan pada kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim dapat mengancam posisi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi pangan dan mengganggu suplai pangan baik skala domestik, regional dan internasional. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, kekeringan cuaca ekstrem, abrasi pantai dan bencana hidrometeorologi lainnya juga meningkatkan kerentanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan pula terhadap sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dampak ini dapat bersifat langsung, seperti kenaikan suhu air laut dan perubahan pola arus, maupun tidak langsung, seperti peningkatan frekuensi badai dan degradasi ekosistem pesisir.

Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif dari pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan risiko tersebut. Oleh karena itu penguatan kapasitas pada level lokal/komunitas, kabupaten/kota dan provinsi dalam beradaptasi dan memitigasi

dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

3. Isu Strategis Daerah

a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing dalam banyak hal akan melahirkan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan, serta melahirkan dampak lain berupa peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani kemiskinan yang dibutuhkan dalam hal ini memberikan kesempatan dan fasilitasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha. Keberdayaan Masyarakat khususnya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kabupaten Kepulauan Selayar akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka stunting. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk

menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif sehingga tingkat kemiskinan tidak meningkat.

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* harus menjadi agenda utama.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang merupakan prioritas utama.

b. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran dreinasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi, ketersediaan akses air minum layak dan sinitasi aman memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama akses jalan, transportasi laut terutama pembangunan pelabuhan yang

relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke kabupaten tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan pariwisata, kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif ke perumahan, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan Kawasan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah.

Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk/embung/bendung dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan optimalisasi. Kerawanan air bersih masih mengancam Kabupaten Kepulauan Selayar yang disebabkan ketersediaan sumber baku dan air permukaan tergantung yang pada musim.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan residu atau sampah perlu ditangani secara komprehensif, sinergi dan berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.

d. Tata Kelola Pemerintahan

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada nilai 55,65 dengan predikat CC / Cukup memadai (data tahun 2022) dengan nilai tersebut masih perlu banyak upaya perbaikan pada setiap komponen penilaian. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal, seperti belum adanya grand design pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi.

e. Pemenuhan Pangan dan Energi

Ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa

pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Alih fungsi lahan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Akibat dari *illegal fishing* dan *destructive fishing* menyebabkan berkurangnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan. Di sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani dan nelayan adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang makin sedikit, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi rendah.

Keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan dampak terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan (Energi Baru Terbarukan).

f. Penerapan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam bidang Iptek adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan Masyarakat yang berbasis pengetahuan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemampuan Iptek daerah menuju masyarakat dan pemerintahan yang maju dan mandiri perlu membangun keterpaduan dalam pengembangan Iptek yang melibatkan secara intensif pelaku peneliti dari perguruan tinggi, Perusahaan maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi Iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

g. Keamanan, Ketertiban, Politik dan Hukum

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam kehidupan sosial budaya yang kondusif. Kesadaran Masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan Bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemendirian masyarakat untuk mengelolah kemanan dan ketertiban.

Perkembangan dalam bidang politik dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran politik dan kedewasaan politik bagi masyarakat serta perkembangan budaya politik sehingga lebih transparan serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung tata pemerintahan yang baik.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

h. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana Alam

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti: sumberdaya air, pertanian, perikanan, infrastruktur permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2021 yang berdampak pada kerusakan fisik. Bencana angin

kencang, banjir, abrasi pantai yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan resiko bencana yang tinggi jika dilihat dari indeks resiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 151, 12 dengan kategori tinggi.

i. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Polusi dan kerusakan lingkungan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Pencemaran air, tanah dan udara semakin meningkat. *Food loss and waste*. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *over capacity* akibat semakin tidak terkendalinya timbulan sampah. Kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan semakin berkurang disebabkan laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan pendukung kehidupan masyarakat.

Tabel 2.6
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kualitas pembangunan manusia yang tinggi dipengaruhi faktor Umur Harapan Hidup yang tinggi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memadai	Belum Optimalnya Pemerataan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Dapat dilihat dari derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat dari: Umur Harapan Hidup yang masih pada angka 73,48 tahun, Indeks Kesehatan pada angka 82,83 poin. Prevalensi stunting masih	Pemenuhan Pelayanan Dasar	1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	Rendahhaya Kualitas Sumber Daya Manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	tinggi masih pada angka 32,1 persen. Kasus tuberkulosis yang masih tinggi dari tahun ke tahun.		12. Perubahan Iklim 13. Sumberdaya Kelautan 14. Ekosistem Daratan 15. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan 16. Kemitraan Global			

2.6. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang.

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029. Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih Adanya Kasus Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Masih Rendahnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan;
3. Masih Rendahnya Status Gizi Balita;
4. Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian TBC;
5. Masih Adanya Masyarakat yang Belum Mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS);
6. Belum Optimalnya Upaya Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
7. Akuntabilitas Kinerja Belum Efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih hasil Pemilihan Kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah : ***“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”***.

Pernyataan visi mengandung makna, yaitu:

Bersama artinya bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah, dengan prinsip Pembangunan:

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan;
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan;
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan;
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan Tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan;
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya;
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan;
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa artinya pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maju artinya kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal.

Sejahtera artinya hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat”, Visi merupakan gambaran kondisi daerah yang diharapkan pada tahun 2029 yaitu :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
2. Lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, ditetapkan Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui ”Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi,

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat” yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui “Program Hilirisasi Sumber Daya Alam” atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin.; dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) pada masing-masing desa melalui “Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, untuk pemerataan Pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antarpulau dan kesatuan wilayah kabupaten

6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama, untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial.
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program “Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, dalam rangka mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, Kepala Daerah terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan Pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu *“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”*.

Adapun uraian ke-7 (Tujuh) misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran 1 (S1) : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif

Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan 2 (T2) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 2 (S2) : Meningkatnya mutu dan akses pendidikan

Sasaran 3 (S3) : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan

Sasaran 4 (S4) : Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan

Sasaran 5 (S5) : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender

Misi 3 Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Tujuan 3 (T3) : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Sasaran 6 (S6) : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah

Sasaran 7 (S7) : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan

Sasaran 8 (S8) : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor

Sasaran 9 (S9) : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

Sasaran 10 (S10) : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran 11 (S11) : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas

Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan

Tujuan 4 (T4) : Meningkatkan kemandirian perdesaan

Sasaran 12 (S12) : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran 13 (S13) : Meningkatnya sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif

Sasaran 14 (S14) : Meningkatnya status desa

Misi 5 Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Tujuan 5 (T5) : Meningkatkan konektivitas wilayah

Sasaran 15 (S15) : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata

Misi 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama

Tujuan 6 (T6) : Meningkatkan kerukunan antar kelompok sosial, budaya dan agama

Sasaran 16 (S16) : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran 17 (S17) : Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju

Tujuan 7 (T7) : Menurunkan penyalagunaan narkoba di lingkungan masyarakat

Sasaran 18 (S18) : Meningkatnya pembinaan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di lingkungan Masyarakat

Misi 7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tujuan 8 (T8) : Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana

Sasaran 19 (S19) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran 20 (S20) : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 3.1

Tujuan, dan Sasaran Bidang Kesehatan yang Sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera											
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat											
		Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,61	73,33	74,04	74,74	75,43	76,13
		Sasaran 3 : Meningkatkan Mutu dan Akses Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,48	73,64	72,98	73,39	73,81	74,53	74,63
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	16,68	36,21	34,5	32,79	31,08	29,37	27,66

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode 2025-2029, yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran 1 (S1) : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif

Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan 2 (T2) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 (S3) : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Mutu dan Akses Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,48	73,64	73,79	73,94	74,09	74,24	74,39
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	5	4	4	3	3	3	3
			Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	67,81	73	78,19	83,38	88,57	93,76	99
		Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	16,68	25,5	23	20,5	18	15,5	13
		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian TBC	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	96,78	97,15	97,52	97,89	98,26	98,63	99
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	77,75	81,29	84,83	88,37	91,91	95,45	99

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			<i>(treatment success rate)</i>								
		Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99	99	99	99	99	99	99
		Meningkatnya Upaya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	%	98,4	98,6 6	98,92	99,18	99,44	99,7	100

3.3. Pentahapan Rencana Strategis

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditentukan prioritas pembangunan tahunan yang terbagi dalam beberapa tahapan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan dan berkelanjutan	Meningkatkan pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil	Peningkatan pemenuhan ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan	Mengoptimalkan pelaksanaan program perbaikan gizi
Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan	Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat
Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular		Pengembangan sistem <i>telemedicine</i>		

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang ditetapkan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	Meningkatkan Mutu dan Akses Kesehatan	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan melalui pemerataan layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pencapaian target SPM bidang kesehatan	
			Pemerataan kuantitas dan kualitas sarana prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya	
			Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD RS dan Puskesmas	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan	
			Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan	
			Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	
			Pemberdayaan masyarakat peningkatan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	
			Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyalit tidak menular dan penyakit menular	
			Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan dan berkelanjutan	
			Meningkatkan pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil	
			Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	
			Pengembangan program peningkatan gizi anak melalui penyediaan makanan bergizi di	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			sekolah dan fasilitas Kesehatan	
			Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	
2.	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik terstandarisasi	
		Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	
			Meningkatkan tata kelola kinerja pemerintahan daerah dan penatausahaan kinerja keuangan	
		Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN	
			Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2025-2029 disusun sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Program Dinas Kesehatan pada Tahun 2025-2029, sebanyak 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mendukung pencapaian target program tersebut, maka ditetapkan indikator program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif			Indeks Reformasi Birokrasi	
					Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	
					Nilai SAKIP OPD	
					Indeks SPBE	
			Meningkatnya Dukungan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Persentase Capaian Kinerja OPD	
					Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perangkat daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Dokumen/ Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Air dan Listrik yang Disediakan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatkan Mutu dan Akses Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu			Indeks Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Status Gizi Balita			Angka Usia Harapan Hidup	
		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian TBC				
		Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional				
		Meningkatnya Upaya Promosi dan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	
					Persentase penderita hipertensi yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	
					Persentase Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Pembangunan Puskesmas
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
					Jumlah Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
					Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak,Gugus Pulau,Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pengelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi		Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Tenaga Kesehatan			
					Rasio tenaga kesehatan per 1.000 satuan penduduk	
				Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
					Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	
					Persentase Industri Makanan Rumah Tangga yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	
					Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
					Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
					Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRT
					Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
					Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
					Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
					Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
					Jumlah rumah tangga/ masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai minum dan sanitasi aman	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
					Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
					Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				192.153.738.620		181.608.459.064		172.087.746.357		163.327.898.924		154.182.086.309	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD			86.485.333.220		82.150.732.596		82.263.182.063		82.839.783.518		83.296.901.912	
	Persentase Capaian Kinerja OPD												
	Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			440.000.000		510.000.000		555.000.000		630.000.000		670.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	55.000.000	3	70.000.000	2	60.000.000	3	80.000.000	2	65.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	35.000.000	1	40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	35.000.000	1	40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		1	35.000.000	1	40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		1	35.000.000	1	40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1	35.000.000	1	40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			75.210.333.220		77.685.732.596		79.178.182.063		80.064.783.518		80.626.901.912	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75.035.333.220		77.485.732.596		78.948.182.063		79.804.783.518		80.336.901.912	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10.000.000		0		0		0		0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			40.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			280.000.000		270.000.000		300.000.000		150.000.000		150.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			220.000.000		270.000.000		300.000.000		150.000.000		150.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		0		0		0		0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.540.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			10.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			10.000.000		0		0		0		0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			50.000.000		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			10.000.000		0		0		0		0	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			0		0		0		0		0	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			0		0		0		0		0	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			0		0		0		0		0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1.400.000.000		0		0		0		0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000		0		0		0		0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000		0		0		0		0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.975.000.000		1.370.000.000		985.000.000		800.000.000		650.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan			2.000.000.000		600.000.000		300.000.000		150.000.000		100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			50.000.000		55.000.000		60.000.000		40.000.000		20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			15.000.000		20.000.000		25.000.000		20.000.000		10.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			850.000.000		650.000.000		550.000.000		550.000.000		500.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.000.000		5.000.000		5.000.000		0		0	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			5.000.000		5.000.000		5.000.000		0		0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.900.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			800.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			350.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			150.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2.600.000.000		0		0		0		0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			1.150.000.000		1.250.000.000		880.000.000		880.000.000		880.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		0		0		0		0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1.000.000.000		1.100.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			150.000.000		150.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			990.000.000		1.010.000.000		305.000.000		250.000.000		250.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			130.000.000		150.000.000		55.000.000		50.000.000		50.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			500.000.000		550.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		0		0		0		0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50.000.000		0		0		0		0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			300.000.000		300.000.000		0		0		0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10.000.000		10.000.000		0		0		0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		0		0		0		0	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat			100.652.531.400		74.823.816.448		61.045.914.374		47.268.012.300		33.490.110.225	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah yang Disediakan			29.742.531.400		9.693.816.448		905.914.374		470.000.000		300.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			0		0		0		0		0	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			2.500.000.000		0		0		0		0	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			5.000.000.000		0		0		0		0	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			1.500.000.000		0		0		0		0	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			8.632.531.400		2.128.816.448		0		0		0	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, AlatKesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			1.000.000.000		500.000.000		285.914.374		150.000.000		100.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			250.000.000		150.000.000		0					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			2.000.000.000		1.500.000.000		0					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000.000		500.000.000		0					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			250.000.000		100.000.000		0					
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			100.000.000		200.000.000		0					
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi PadaUnit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar												
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			6.000.000.000		4.000.000.000		0		0		0	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			500.000.000		600.000.000		600.000.000		300.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		0		0		0		0	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan			0		0		0		0		0	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000			
Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.880.000.000		65.130.000.000		60.140.000.000		46.798.012.300		33.190.110.225	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			500.000.000		400.000.000		250.000.000		100.000.000		50.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			500.000.000		400.000.000		250.000.000		100.000.000		50.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		20.000.000		10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		20.000.000		10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			250.000.000		200.000.000		150.000.000		50.000.000		20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			250.000.000		200.000.000		150.000.000		50.000.000		20.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			250.000.000		200.000.000		150.000.000		50.000.000		20.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		20.000.000		10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		20.000.000		10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		20.000.000		10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1.000.000.000		900.000.000		800.000.000		650.000.000		500.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			100.000.000		80.000.000		50.000.000		35.000.000		15.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.500.000.000		2.200.000.000		2.000.000.000		800.000.000		500.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.000.000.000		4.000.000.000		3.000.000.000		2.000.000.000		1.000.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			250.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		75.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			250.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		50.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			2.500.000.000		2.200.000.000		2.000.000.000		800.000.000		600.000.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			35.000.000.000		35.000.000.000		34.500.000.000		29.000.000.000		19.910.110.225	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			20.000.000		20.000.000		20.000.000					
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan												
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			100.000.000		80.000.000		50.000.000					
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit												
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			17.000.000.000		17.000.000.000		15.000.000.000		12.000.000.000		10.000.000.000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.500.000.000		1.200.000.000		1.000.000.000		663.012.300		250.000.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian IkutanPasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			20.000.000									
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			20.000.000									
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20.000.000									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20.000.000									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			20.000.000									
Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			20.000.000									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			150.000.000		150.000.000		120.000.000		100.000.000		80.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak												
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan												
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi			20.000.000									
Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji			20.000.000									
Pengelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan			4.533.130.200		24.253.275.800		28.417.694.100		32.582.112.400		36.746.530.700	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			4.533.130.200		24.133.275.800		28.237.694.100		32.342.112.400		36.446.530.700	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0		500.000.000		525.000.000		550.000.000		575.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			0		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			4.533.130.200		21.133.275.800		24.712.694.100		28.292.112.400		31.871.530.700	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			0		100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			400.000.000		152.808.720		102.031.260		347.967.086		327.420.792	
Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			400.000.000		152.808.720		102.031.260		347.967.086		327.420.792	
Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			400.000.000		152.808.720		102.031.260		347.967.086		327.420.792	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			0		0		0		0		0	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga												
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			0		0		0		0		0	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)												
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			0		0		0		0		0	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan												
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			0		0		0		0		0	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			82.743.800		227.825.500		258.924.560		290.023.620		321.122.680	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			82.743.800		227.825.500		258.924.560		290.023.620		321.122.680	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			82.743.800		227.825.500		258.924.560		290.023.620		321.122.680	
Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/ masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai minum dan sanitasi aman			0		0		0		0		0	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			0		0		0		0		0	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0		0		0		0		0	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten			0		0		0		0		0	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0		0		0		0		0	

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Pelayanan Kesehatan Gratis Dengan BPJS	Meningkatnya Akses Mutu dan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Gratis Dengan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan	Subkegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Bantuan Rumah Singgah dan Ambulans Bagi Keluarga Pasien Rujukan Di Makassar, Agar Pasien Taat Mengikuti Tindak Lanjut Perawatannya	Subkegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pemeriksaan Kesehatan Keliling Gratis Sebagai Tindak Lanjut Program Pemerintah Pusat	Subkegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berisiko Tinggi	Subkegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Kesehatan	Subkegiatan : Pembangunan Puskesmas
				Subkegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Subkegiatan : Pengembangan Puskesmas
				Subkegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Subkegiatan : Pengembangan Rumah Sakit

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,48	73,64	73,79	73,94	74,09	74,24	74,39
2.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	16,68	25,5	23	20,5	18	15,5	13
3.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	67,81	73	78,19	83,38	88,57	93,76	99
4.	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	5	4	4	3	3	3	3
5.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	96,78	97,15	97,52	97,89	98,26	98,63	99
6.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	77,75	81,29	84,83	88,37	91,91	95,45	99
7.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99	99	99	99	99	99	99
8.	Persentase Posyandu Aktif	%	98,4	98,66	98,92	99,18	99,44	99,7	100

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	99,48	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	94,03	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	92,23	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang	%	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mendapatkan Layanan Kesehatan								
9.	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	73,87	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
14.	Rasio Tenaga Medis Per 1.000 Satuan Penduduk	Angka (per 1.000 satuan penduduk)	0,66	0,68	0,70	0,71	0,74	0,76	0,80

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15.	Rasio Tenaga Kesehatan Per 1.000 Satuan Penduduk	Angka (per 1.000 satuan penduduk)	13,29	13,40	13,50	13,75	14,03	14,35	14,70
16.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	75	77	80	85	90	95	100
17.	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	27,24	32,24	42,24	52,24	72,24	82,24	92,24
18.	Persentase Industri Makanan Rumah Tangga yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	64,8	70	75	80	85	90	95
19.	Persentase Posyandu Aktif	%	98,4	98,66	98,92	99,18	99,44	99,7	100

Tabel 4.6
Penetapan Target Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030

NO.	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12.	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 4.7
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PENCAPAIAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan								
1.3.1.(a)	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	98,81	100	100	100	100	100
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lanjutan	%	88,4	89,43	90,06	91,43	92,1	93,51
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan								
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	%	18,48	16,15	14,34	12,13	10,42	9,05
2.2.1	Prevalensi Stunting Pada Anak di	%	18,3	16,55	11,81	8,34	7,92	5,08

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PENCAPAIAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Bawah 5 Tahun/Balita							
2.2.1.(a)	Prevalensi Stunting Pada Anak di Bawah 2 Tahun/Baduta	%	13,8	12,39	9,25	8,44	7,39	5,86
2.2.2.(a)	Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil	%	8,94	8,12	7,95	6,51	5,23	5,05
2.2.2.(b)	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	%	72,60	75,78	81,15	84,60	87,50	90,35
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	287	117	106	84	40	26
3.1.2	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100	100	100	100	100	100
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	10,3	9,32	8,32	7,24	6,08	5,60

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET PENCAPAIAN				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 Orang	per 1.000 penduduk	0,009	0,10	0,08	0,07	0,01	0,07
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV Pada Populasi Dewasa	%	0,40	0,07	0,96	0,01	0,40	0,37
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	334	159	158	335	334	292
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	16,10	15	14,63	12,77	10,56	10,44
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,81	99,63	99,79	100	100	100
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak								
6.2.1.(c)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	59	61	63	65	67	69

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan 2025-2029 sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan, sasaran dan program pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Agustus 2025

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar**

dr. H. Husaini, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005